

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program	SS. 1 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Deskripsi SP	Pengelolaan Produksi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana tercapainya nilai produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan serta nilai ekspor perikanan yang disesuaikan pada Target RKP 2024. Rincian target produksi perikanan pada tahun 2024 adalah 6,00 juta ton pada perikanan tangkap dan 24,85 juta ton pada perikanan budidaya. Secara matematis total produksi perikanan adalah 30,85 juta ton. Kemudian target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2024 adalah 7,20 Miliar US\$. Target Total pada Dokumen PK Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah 100%.
Indikator Kinerja	: Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan
Kualitas Indikator Kinerja	: Ultimate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px;">Definisi:</div> <p>Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2024 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2024. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2024.</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan, pada pihak internal adalah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan pada pihak eksternal adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px;">Formula:</div> $\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024})} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2024}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2024}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">2</p> <div style="background-color: #d1ecf1; padding: 5px;">Tujuan:</div> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terkait produksi perikanan yang berkelanjutan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Tingkat Kendali IKU	: <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit Penanggung jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Unit/Pihak Penyedia Data :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perdagangan 4. Badan Statistik Indonesia
--

Sumber Data :

1. Dokumen Capaian Produksi Perikanan Tangkap 2. Dokumen Capaian Produksi Perikanan Budidaya 3. Dokumen Capaian Nilai Ekspor Perikanan Sektor KP
--

Jenis Konsolidasi Periode :

<input type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take last
------------------------------	----------------------------------	---

Jenis Konsolidasi Lokasi :

<input checked="" type="checkbox"/> Sum	<input type="checkbox"/> Average	<input type="checkbox"/> Raw Data
---	----------------------------------	-----------------------------------

Polarisasi Indikator Kinerja :

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

Periode Pelaporan :

<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
-----------------------------------	-------------------------------------	---

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	90%	90%	100%

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Aniza Suspita

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	SS. 1 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Deskripsi SP	<p>Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laut Sebagai Sumber Pangan 2. Kesempatan berusaha dan bekerja bagi perikanan tradisional (artisanal); 3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam 4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon 5. Laut Sebagai Perlindungan Pesisir 6. Laut Sebagai Sumber Matapencaharian dan Ekonomi 7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi 8. Laut Sebagai Tempat Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis 9. Laut Sebagai Perairan Yang Bersih 10. Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja	: Indeks Kesehatan Laut Indonesia
Kualitas Indikator Kinerja	: Ultimate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>10 tujuan tersebut didapatkan dari K/L Teknis yang terkait yang kemudian angka tersebut dikoordinasikan dan dielaborasi sehingga menjadi kesatuan nilai IKLI Agregat per tahunnya. KKP bertanggungjawab atas tujuan 1-6,8,10, KLHK bertanggungjawab atas tujuan 4,9, KemenATR bertanggungjawab atas tujuan 5 dan Kemenparekraf bertanggungjawab atas tujuan 7</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian IKLI, pada pihak internal adalah Biro Perencanaan dan pada pihak eksternal adalah KKP, KLHK dan KemenATR.</p> <p>Formula:</p> <p><i>IKLI Agregat=Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10</i></p> <p>Tujuan:</p> <p>Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia</p>
Satuan Pengukuran	: Indeks
Tingkat Kendali IKU	: () High (x) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU	: () Exact (x) Proxy () Activity
Unit Penanggung jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Unit/Pihak Penyedia Data	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia 4. Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sumber Data :

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	-	-	-
TRIWULAN 2	-	-	-
TRIWULAN 3	-	-	-
TRIWULAN 4	76	76	76

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Aniza Suspita

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	SS. 2 Terwujudnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas
Deskripsi SP	Apabila seluruh rumusan kebijakan di bidang sumber daya maritim yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator
Indikator Kinerja	: Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti
Kualitas Indikator Kinerja	: Immediate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan.</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian IKU (<i>crosscutting</i>) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Internal : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan • Eksternal : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Karantina Indonesia 2. Rancangan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> • Internal : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi • Eksternal : Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Asosiasi, Pelaku Usaha, Nelayan, BNSP 3. Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Rumpuk Laut Terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, BRIN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten 4. Rancangan Kebijakan Penguatan Pemasaran Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian BUMN; Kementerian Keuangan; Badan Karantina Indonesia; Nusantara Aquatic; AP5I; INAFISH 5. Rancangan Rekomendasi Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN , Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS, BPOM, BRIN, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Pemerintah Daerah lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat dan Kementerian/Lembaga teknis terkait lainnya 6. Rancangan Kebijakan Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim <ul style="list-style-type: none"> • Internal : -

- Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian PUPR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian BUMN; Kementerian Investasi/BKPM; dan Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri; Kejaksaan Agung; Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Badan Informasi Geospasial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

7. Rancangan Kebijakan Kelautan Global (Ocean 20)

- Internal : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.
- Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian PUPR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian BUMN; Kementerian Investasi/BKPM; dan Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pertanian; dan Kementerian Dalam Negeri;

Formula:

$$\frac{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L}}{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya maritim dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Tingkat Kendali IKU	:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Sumber Data	:	Ringkasan Kebijakan dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	25%	25%	25%
TRIWULAN 2	50%	50%	50%
TRIWULAN 3	70%	70%	70%
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aniza Suspita', written in a cursive style.

Aniza Suspita

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	SS. 2 Terwujudnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Maritim Yang Berkualitas
Deskripsi SP	Apabila seluruh rumusan kebijakan di bidang sumber daya maritim yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator
Indikator Kinerja	: Persentase Isu Strategis yang Diselesaikan
Kualitas Indikator Kinerja	: Immediate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi: Menunjukkan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi.</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian IKU (<i>crosscutting</i>) adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktif Pimpinan: Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan NGO 2. Major Project: Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangun 3. Direktif Pimpinan : Koordinasi Penangkapan Ikan Terukur <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Akademisi, Asosiasi 4. Major Project : Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR 5. Direktif Pimpinan : Koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas, UN, FAO, ILO 6. Direktif Pimpinan : Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam <ul style="list-style-type: none"> • Internal : - • Eksternal : Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, BRIN, BMKG, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut, Kementerian ESDM, Perguruan Tinggi 7. Direktif Pimpinan : Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara <ul style="list-style-type: none"> • Internal : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan • Eksternal : Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Pertanian; Kementerian Investasi/BKPM: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 8. RB Tematik : Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Internal : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

- Eksternal : Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah Provinsi
9. RB Tematik : Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu – Hilir
- Internal : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
 - Eksternal : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi

Formula:

$$\frac{\text{Isu-isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi}}{\text{Isu-isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang sumber daya maritim yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi.

Satuan Pengukuran	:	Persentase
Tingkat Kendali IKU	:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit Penanggung jawab	:	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Sumber Data	:	Laporan Progres Capaian Isu Strategis
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	25%	25%	25%
TRIWULAN 2	50%	50%	50%
TRIWULAN 3	70%	70%	70%
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Aniza Suspita

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	SS. 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	Merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.
Indikator Kinerja	: Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kualitas Indikator Kinerja	: Intermediate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi: Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah nilai atas capaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian IKU (crosscutting) adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: Sekretariat Kementerian Koordinator • Eksternal: Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan <p>Formula:</p> $\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPZI}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPZI}} \times 100\%$ <p>Tujuan: Untuk mengukur capaian Nilai Bobot PMPZI pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Tingkat Kendali IKU	: <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit Penanggung jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Unit/Pihak Penyedia Data	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Sumber Data	: Nota Dinas Penyampaian Capaian Nilai Bobot PMPZI Lingkup Deputi II
Jenis Konsolidasi Periode	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1			
TRIWULAN 2			
TRIWULAN 3			
TRIWULAN 4			86%

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Aniza Suspita

Manual Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim

Sasaran Program (SP)	SS. 3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Efektif dan Efisien
Deskripsi SP	Merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.
Indikator Kinerja	: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Kualitas Indikator Kinerja	: Intermediate Outcome
Deskripsi Indikator Kinerja	<p>Definisi: Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).</p> <p>Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian IKU (crosscutting) adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal: Sekretariat Kementerian Koordinator • Eksternal: Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <p>Formula: Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</p> <p>Tujuan: Untuk mengukur capaian Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Tingkat Kendali IKU	: <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit Penanggung jawab	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Unit/Pihak Penyedia Data	: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Sumber Data	: Dokumen Laporan SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Jenis Konsolidasi Periode	: <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Triwulan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1			
TRIWULAN 2			
TRIWULAN 3			
TRIWULAN 4	76	76	77

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Aniza Suspita